

Relevansi Pemikiran Karl Marx terhadap Masalah Korupsi di Indonesia dan Implementasinya dalam Kehidupan Gerejawi

Eder Timanta Sitepu

Universitas Bina Nusantara Jakarta
Email Korespondensi: eder.sitepu@binus.ac.id

Abstract: Nowadays, Indonesia is experiencing a huge corruption phenomenon. This condition can be seen from various corruption cases that ensnare various circles in Indonesia. Corrupt perpetrators are not only workers who are squeezed by needs, but also economically well-established groups. Faced with this situation, it is important to find the root of the corruption problem that can raise public awareness. The public must be aware that corruption is very much eating away at the lives of the Indonesian people who are still trapped in poverty and enormous economic inequality. One of the thinkers who gave an overview of the phenomenon of corruption in Indonesia was Karl Marx. This paper aims to explore the relevance of Karl Marx's theory of alienation in analyzing the root causes of corruption in Indonesia. The research method used in this study is a qualitative approach with a literature study on Karl Marx's thoughts, especially Karl Marx's theory of Alienation. The results of this study show that the capitalist economic system that focuses on the pursuit of profit as much as possible contributes as much as possible as the cause of corruption in Indonesia. The capitalist economic system creates alienation from one's work and self. The power of money will give rise to greedy human character. In other words, Corruption based on Karl Marx's thought arose because of the capitalist economic system that was uncontrollable and created greedy human beings.

Keywords: Corruption, Indonesia, Alienation, Karl Marx.

Abstrak: Dewasa ini, Indonesia sedang mengalami fenomena korupsi yang sangat besar. Kondisi ini dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi yang menjerat berbagai kalangan di Indonesia. Pelaku korupsi bukan hanya pekerja yang terhimpit kebutuhan, tetapi juga golongan yang secara ekonomi sangat mapan. Berhadapan dengan situasi tersebut, penting untuk menemukan akar masalah korupsi yang dapat menimbulkan kesadaran masyarakat. Masyarakat mesti sadar bahwa korupsi sangat menggerogoti kehidupan bangsa Indonesia yang masih terjebak dalam kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang sangat besar. Salah satu pemikir yang memberikan gambaran terkait fenomena korupsi di Indonesia adalah Karl Marx. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji relevansi Teori Alienasi Karl Marx dalam menganalisis akar penyebab fenomena korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan pada pemikiran-pemikiran Karl Marx, khususnya teori Alienasi Karl Marx. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalis yang berfokus pada pencarian untung sebesar-besarnya berkontribusi sebagai penyebab korupsi di Indonesia. Sistem ekonomi kapitalis menimbulkan keterasingan pada pekerjaan dan diri seseorang. Kekuasaan uang akan menimbulkan karakter manusia yang serakah. Dengan kata lain, Korupsi berdasarkan pemikiran Karl Marx timbul karena sistem ekonomi kapitalis yang tidak terkendali dan menciptakan manusia yang serakah.

Kata Kunci: Korupsi, Indonesia, Alienasi, Karl Marx.

Article History

Submitted: 08 April 2025	Revised: 11 Juli 2025	Accepted: 31 Juli 2025
--------------------------	-----------------------	------------------------

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia seperti binatang liar yang memangsa orang jujur dalam sistem yang korup. Pelakunya tidak hanya pekerja dengan gaji minim yang terhimpit kebutuhan, tetapi juga mereka yang secara ekonomi tergolong cukup mapan.

Koruptor tidak tertarik melihat keadaan bangsa ini masih tersandera kemiskinan. Korupsi memang bukan satu-satunya penyebab terjadinya kemiskinan, namun korupsi menjadi satu tindakan yang melanggengkan dan menyuburkan kemiskinan di Indonesia. Tindakan korupsi menggerogoti kemampuan negara untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat (Karman, 2014). Hal ini terlihat dari skor Indeks persepsi korupsi Indonesia yang dirilis oleh Transparency International setiap tahunnya. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada skor 37 dan peringkat 99 dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2024 (Transparency International Indonesia, 2025).

Struktur dan sistem ekonomi yang koruptif membuat sebagian besar rakyat Indonesia masih menjadi budak di tanah sendiri. Persaingan antara pengusaha satu dengan pengusaha yang lain untuk meraup keuntungan sebesar-sebesarnya pun tidak terbendung karena terikat oleh sebuah struktur. Persaingan itu pun sering kali tidak memperhatikan cara melakukan kegiatan ekonomi yang etis, yang seharusnya tidak merugikan pihak lain (Medellu, 2021). Korupsi yang merajalela akan terus membelit Indonesia memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi. Sistem dan struktur ekonomi membuat para penguasa saling bertarung untuk menghasilkan uang dan keuntungan yang lebih banyak. Sementara itu, rakyat-rakyat kecil akan terus berjuang dengan susah payah untuk menghasilkan uang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari(Ayu Maharani et al., 2024). Kasus korupsi terbaru yang sangat menggemparkan publik adalah korupsi anak perusahaan Pertamina yaitu Pertamina Patra Niaga. Kasus korupsi ini melibatkan para petinggi di perusahaan tersebut yang nyatanya memiliki gaji yang cukup besar (BBC News, 2025).

Banyak teori yang dikembangkan untuk mengkaji masalah korupsi di Indonesia. Salah satu teori yang banyak digunakan untuk melihat faktor-faktor penyebab korupsi adalah teori fraud triangle. Teori ini berfokus pada pengawasan dan pengelolaan finansial. Teori ini menyatakan bahwa kasus korupsi yang merupakan bagian dari fraud dapat terjadi oleh tiga faktor, yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi (Wicaksono & Prabowo, 2022). Selain itu, masalah korupsi di Indonesia banyak dikaji dengan menggunakan perspektif hukum. Salah satu kajian masalah korupsi dari sudut pandang hukum diteliti oleh Andyn Sofyanoor. Menurutnya, untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pengawasan regulasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi, dan penegakan Hukum

Tta Usaha Negara melalui peraturan perundang-undangan(Sofyanoor, 2022). Sementara itu,kajian tentang masalah korupsi masih jarang dianalisis dari perspektif teori alienasi Karl Marx.”

Karl Marx, melalui filsafat materialisme menyatakan bahwa dunia ini tiada lain terdiri dan tergantung kepada benda materi. Seluruh realitas dan seluruh kejadian dapat dijabarkan kepada materi dan proses material (Ramly, 2013). Karl Marx mengkritik dan ingin merevolusi sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan manusia terasing dari dirinya sendiri akibat kerja yang terpaksa. Keterasingan manusia dari diri sendiri itu mengemuka dalam wujud kekuasaan uang yang membiarkan manusia menjadi makhluk serakah. Manusia tidak lagi bertindak demi sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri atau demi kebutuhan sesama, melainkan hanya sejauh tindakannya menghasilkan uang. Sifat sosial manusia menjadi hilang karena kekuasaan uang. Demikianlah korupsi terjadi akibat keinginan memiliki uang yang tidak terbatas yang berakibat kepada keterasingan kepada sesama manusia (Suseno, 2000).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji relevansi teori alienasi Karl Marx dalam menganalisis fenomena korupsi di Indonesia serta menggali kontribusi teoritik bagi respons teologi dan sosial. Relevansi pemikiran Karl Marx akan ditelaah agar memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah korupsi di Indonesia. Selain itu, teori alienasi Karl Marx tersebut akan susun pengimplementasiannya dalam konteks sosial dan agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam kajian ini adalah studi kualitatif eksploratif dengan pendekatan filsafat sosial-kritis. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan penafsiran data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait suatu fenomena(Miles & Huberman, 2014). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dari sumber-sumber sekunder yang memuat pemikiran-pemikiran Karl Marx. Penulis menelaah berbagai literatur pemikiran Karl Marx, khususnya teori alienasi dalam kaitannya dengan fenomena korupsi di Indonesia. Selain itu, penulis juga melengkapi penelitian ini dengan pembacaan literatur lain yang memberikan gambaran terkait fenomena korupsi di Indonesia. Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, penulis menganalisis dan menginterpretasikan pemikiran Karl Marx dalam rangka merespons fenomena korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materialisme Historis dan Materialisme Dialektika

Karl Marx memetakan materialisme ke dalam materialisme historis dan materialisme dialektika. Materialisme historis merupakan pandangan ekonomi terhadap sejarah. Kata historis ditempatkan dengan maksud untuk menjelaskan berbagai tingkat perkembangan ekonomi masyarakat yang terjadi sepanjang zaman. Materialisme yang dimaksud oleh Karl Marx adalah mengacu pada pengertian benda sebagai kenyataan yang pokok (Suseno, 2000).

Menurut Karl Marx yang menentukan perkembangan masyarakat bukan kesadaran, jadi bukan apa yang dipikirkan masyarakat tentang dirinya sendiri, melainkan keadaan masyarakat yang nyata. Apa “keadaan masyarakat” atau “keadaan sosial” itu? Keadaan sosial manusia adalah produksinya, pekerjaannya. Manusia ditentukan oleh produksi mereka, baik apa yang mereka produksi, maupun cara mereka berproduksi. Jadi manusia bergantung pada syarat-syarat material produksi mereka. Cara itulah yang juga menentukan kesadaran manusia. Menurut Karl Marx, cara manusia berpikir ditentukan oleh cara ia bekerja. “Kesadaran tidak mungkin lain dari keadaan yang disadari, dan keadaan manusia adalah proses manusia yang sesungguhnya. Jadi untuk memahami sejarah dan arah perubahannya, tidak perlu memerhatikan apa yang dipikirkan manusia, melainkan bagaimana ia bekerja, bagaimana ia berproduksi (Suseno, 2000). Sementara itu, materialisme dialektika bertitik tolak dari materi sebagai satu-satunya kenyataan. Karl Marx mengartikan materialisme dialektika sebagai keseluruhan proses perubahan yang terjadi terus menerus tanpa ada yang mengantari. Proses itu kemudian menimbulkan kesadaran melalui proses pertentangan. Materi yang dimaksud menjadi sumber keberadaan benda-benda alamiah, senantiasa bergerak dan berubah tanpa henti-hentinya (Farihah, 2015).

Pandangan materialisme dialektika dan materialisme historis Karl Marx erat kaitannya dengan pola produksi dalam sistem ekonomi kapitalis yang berlangsung diberbagai belahan dunia sampai hari ini. Menurut teori tersebut pola produksi dan pola bekerja manusia dalam sistem ekonomi kapitalis menghasilkan kesadaran bahwa berproduksi dan bekerja adalah untuk berkompetisi mengumpulkan dan mengkapitalisasi materi atau uang. Kesadaran tersebut menumbuhkan bibit-bibit persaingan yang kemudian menempatkan orang pada tingkat saling mengasingkan satu dengan yang lain. Manusia tidak lagi membiasakan diri untuk hidup saling

berdampingan satu dengan yang lain. Semua orang memiliki pandangan bahwa sesama saya adalah saingan saya untuk mencapai kapital yang lebih besar (Raharusun, 2021). Kesadaran akan pola produksi dan bekerja semacam itu kemudian menghasilkan kondisi bahwa uang dan materi adalah tujuan yang utama dalam hidup.

Pemikiran Karl Marx tentang Agama

Karl Marx menyatakan bahwa agama adalah suatu alienasi. Kritiknya terhadap agama ini merupakan bagian dari kritiknya terhadap masyarakat kapitalis yang telah menimbulkan alienasi dalam diri kaum buruh. Menurut Marx, sebagaimana sistem ekonomi kapitalis telah menyebabkan buruh teralienasi, demikian juga agama telah membalikkan perhatian manusia dari situasi riil dunia ini dan mengarahkannya kepada dunia sesudah kematian (Agustina, 2022). Konsep agama sebagai suatu alienasi yang dimiliki Karl Marx tentu memiliki kaitan erat dengan apa yang pernah dinyatakan oleh Feuerbach. Menurut Marx, ciri-ciri khas yang dikenakan kepada Allah sebetulnya tidak lain daripada ciri-ciri khas manusia yang diproyeksikan pada Allah yang mengontrol manusia melalui perintah-perintahNya (Bernard Raho, 2013).

Menurut Karl Marx, pada zamannya manusialah yang telah menciptakan Tuhan dan bukan Tuhan yang menciptakan manusia. Agama telah membalikkan semua kenyataan tersebut dengan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia. Agama hanyalah sebuah ideologi yang sama seperti ideologi-ideologi lainnya. Penekanan agama pun cenderung mengarah pada dunia transenden, non-material dan harapan akan hidup sesudah kematian membuat manusia mengalihkan perhatiannya dari penderitaan fisik dan kesulitan material di dunia ini.

Selain itu, Karl Marx juga menyatakan bahwa agama memiliki ciri-ciri menghibur atau candu bagi masyarakat (Rois, 2019). Apa pun penghiburan yang diperoleh melalui agama untuk mereka yang menderita dan tertekan, hiburan itu bersifat sementara. Agama hanyalah memberikan legitimasi atas penderitaan dan kesengsaraan di dunia ini. Sebagai satu kekuatan yang bisa memberikan hiburan dan membuat orang mampu bertahan di dalam penderitaannya. Agama juga digunakan untuk meyakinkan kelas-kelas sosial yang berkuasa dan memperoleh keuntungan dari kepincangan-kepincangan sosial itu dengan mengatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki berasal dari otoritas Tuhan. Kepatuhan dari kelas-kelas

yang dieksplorasi dan tertindas tercermin dalam ketaatan mereka terhadap agama. Agama menawarkan imbalan dari perjuangan, kesulitan, penderitaan dalam kehidupan di dunia ini dengan kebahagiaan di dalam kehidupan yang akan datang, tetapi kebahagiaan itu bisa diperoleh hanya kalau orang menerima semua penderitaan termasuk ketidakadilan yang mereka alami selama hidup di dunia ini (Bernard Raho, 2013).

Marx percaya bahwa masyarakat membentuk kodrat manusia dan bukan sebaliknya. Maka, mengubah masyarakat berarti mengubah kodrat manusia dan sebagai akibatnya, masalah-masalah masyarakat dan masalah-masalah manusia akan lenyap. Ia mempertahankan pandangan ini karena ia adalah seorang materialis ia lebih mengarahkan pandangannya tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah manusia dengan cara konkret. Dengan kata lain, Karl Marx sebenarnya bukan mengkritik hakikat dari agama tetapi karakter dari orang-orang yang ada di dalam agama tersebut. Orang-orang beragama pada masa itu cenderung ingin menyelesaikan/menghindari masalah dengan cara masuk ke dalam agama. Alih-alih memperbaiki keadaan miskin yang represif ini lewat praksis, agama malah meninabobokan orang lewat khayalan surgawi. Agama, menurut Marx tidak bersifat emansipatoris, artinya tidak membebaskan manusia dari keadaan miskinnya (Tjahjadi, 2016).

Kritik Karl Marx tentang pola beragama sampai saat ini masih muncul dalam bentuk-bentuk yang hampir mirip dengan yang terjadi pada masa itu. Hal ini dapat diperhatikan dari pola ibadah yang selalu memusatkan perhatian pada kehidupan yang akan datang dan mengabaikan kehidupan di masa kini. Hal ini dipertegas dengan salah satu penelitian yang melihat bagaimana pola beragama sebuah komunitas gereja di wilayah Nusa Tenggara Timur. Penelitian tersebut menyatakan bahwa gereja masih sangat minim dalam memperhatikan keadaan ekonomi sosial jemaat. Perhatian lebih besar diberikan pada penjelasan tentang surga yang tenang dan damai, sementara penderitaan akibat kemiskinan di dunia dianggap sebagai ujian belaka (de Haan & Takene, 2021).

Kritik Karl Marx terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis Teori Kelas Sosial

Menurut Karl Marx pelaku-pelaku utama perubahan sosial bukanlah individu-individu tertentu, melainkan kelas-kelas sosial. Manusia hanya dapat memahami sejarah dengan segala perkembangan yang terjadi melalui kelas-kelas sosial dalam

masyarakat yang bersangkutan. Menurut Marx masyarakat kapitalis terdiri dari tiga kelas, bukan dua kelas, sebagaimana anggapan umumnya, juga dalam banyak kalangan Marxis. Tiga kelas itu adalah kaum buruh, kaum pemilik modal dan para tuan tanah. Tetapi dalam analisis keterasingan tuan tanah tidak dibicarakan dan pada akhir kapitalisme para tuan tanah akan menjadi sama dengan para pemilik modal. Keterasingan dalam pekerjaan terjadi karena orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan jatuh dalam dua kelas sosial yang berlawanan, yaitu kelas buruh dan kelas majikan. Sistem produksi kapitalis memperhadapkan kelas buruh dengan kelas pemilik. Keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Buruh hanya dapat bekerja apabila pemilik membuka tempat kerja baginya. Demikian juga, majikan hanya beruntung dari pabrik dan mesin-mesin yang dimilikinya apabila ada buruh yang mengerjakannya. Namun, saling ketergantungan itu tidak seimbang. Buruh tidak dapat hidup kalau ia tidak bekerja. Sebaliknya, meskipun si pemilik tidak mempunyai pendapatan kalau pabriknya tidak berjalan, tetapi ia masih dapat bertahan lama. Ia dapat hidup dari modal yang dikumpulkannya selama pabriknya bekerja (Suseno, 2000).

Dengan demikian kelas pemilik adalah kelas yang kuat dan para pekerja adalah kelas yang lemah, para pemilik dapat menetapkan syarat-syarat bagi mereka yang mau bekerja, dan bukan sebaliknya. Kaum buruh mati-mati mencari pekerjaan terpaksa menerima upah dan syarat-syarat kerja lain yang disodorkan oleh si kapitalis. Jadi, dalam hubungan produksi, yang berkuasa adalah para pemilik, sedangkan yang dikuasai adalah para pekerja. Kekuasaan itu dipakai untuk menindas keinginan kaum buruh untuk menguasai pekerjaan mereka sendiri, untuk tidak dihisap, agar kaum buruh bekerja seluruhnya demi mereka. Karena itu, kelas pemilik kapital secara hakiki merupakan kelas penindas. Menurut Marx, setiap kelas sosial bertindak sesuai dengan kepentingannya dan kepentingannya ditentukan oleh situasi yang objektif (Suseno, 2000).

Tampak bahwa hubungan kerja dalam sistem produksi kapitalis, dalam perspektif Marx, dilihat tidak stabil. Kepentingan dua aktor utama tidak dapat disesuaikan. Sistem kapitalis untuk sementara stabil karena salah satu dari dua pihak berkuasa sedangkan pihak yang lain dikuasai. Karena para pemilik menguasai bidang ekonomi, mereka dapat memenangkan kepentingan mereka terhadap kepentingan kelas buruh. Tetapi, apabila kekuasaan kelas atas berkurang, hubungan sosial tidak dapat stabil lagi. Kelas buruh secara otomatis akan semakin mampu memenangkan kepentingan mereka, sehingga akhirnya terjadi revolusi, dan hak

milik pribadi dapat dihapuskan (Suseno, 2000).

Pencarian Untung Sebesar-besarnya

Ada dua kekuatan yang mendorong kaum kapitalis untuk terus memperjuangkan kelasnya yaitu, keinginan untuk semakin menambah milik pribadi mereka dan adanya persaingan di antara perusahaan-perusahaan. Keinginan untuk menambah milik itu membuat para pengusaha menanamkan kapital mereka untuk semakin memperbaiki mesin-mesin, agar dapat memperluas perusahaannya. Jadi, segala sesuatu dipakai untuk semakin menambah kepemilikan kapital. Perluasan perusahaan-perusahaan itu dimaksud agar supaya dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Akibatnya segala perusahaan yang kecil dan lemah gulung tikar, sehingga monopoli berada di tangan perusahaan-perusahaan yang besar (Hadiwijono, 1980).

Hukum keras kapitalisme adalah persaingan, produktivitas produksi harus ditingkatkan terus menerus. Dari segi *output* perbedaan kapitalisme dari sistem-sistem produksi lain adalah bahwa nilai yang ingin dihasilkan oleh para peserta pasar adalah nilai tukar dan bukan nilai pakai. Maksudnya, orang memproduksi atau membeli sesuatu bukan karena ia mau menggunakannya, melainkan karena ia ingin menjualnya lagi dengan keuntungan yang paling tinggi (Suseno, 2000). Keuntungan itu sendiri sangat penting, karena hanya kalau laba cukup besar, seorang usahawan akan bertahan dalam persaingan ketat dengan pengusaha lainnya. Secara sederhana, tujuan sistem ekonomi kapitalis adalah uang, dan bukan barang yang diproduksi. Barang hanyalah sarana untuk memperoleh uang. Hal itu yang membuat borjuasi dalam analisis Marx secara terbuka menempatkan kepentingan egoistik, yaitu kepentingan untuk memperoleh keuntungannya sendiri, sebagai nilai tertinggi. Usaha untuk mencapai keuntungan semaksimal mungkin itulah yang mendorong borjuasi untuk menjelajahi semua benua dan melayari semua samudera (Suseno, 2000).

Persaingan dapat disebut sebagai sebuah arena dimana semua orang memiliki kesempatan untuk mencari keuntungan. Namun, persaingan menjadi tidak sehat karena tidak semua orang memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya, khususnya kaum buruh. Persaingan dapat disebut sebagai ruang terbuka bagi semua. Namun, pada akhirnya yang terjadi dalam persaingan adalah penghisapan atas orang lain. Akibatnya, pencarian untung sebesar-besarnya bukan hanya untuk bertahan hidup semata, namun menjadi sebuah keharusan untuk

menjaga ketahanan usaha di pasar. Suasana persaingan pun berubah dari mempertahankan hidup menjadi sebuah pengabaian atas golongan yang lain (Suseno, 2000).

Keterasingan dalam Pekerjaan

Karl Marx menggambarkan keterasingan dengan membandingkan sistem produksi pertanian dan sistem kapitalis. Sistem produksi pertanian masih memberikan ruang bagi para pekerja untuk menentukan hari kerja dan proses kerja. Berbeda dengan pekerja upahan yang bekerja di dalam pabrik. Pekerja upahan menjual tenaganya kepada pemilik modal yang mempekerjakannya dan kehilangan kontrol terhadap proses kerja karena diatur oleh pemilik modal tersebut. Keterasingan yang dibahas oleh Karl Marx berusaha untuk melukiskan implikasi dari hilangnya kontrol ini, di mana aspek-aspek dasar proses kerja menjadi asing dan dipaksakan terhadap pekerja. Pekerja menjadi terasing dari pekerjaannya sendiri, dari hasil kerjanya yang dijual di pasar oleh majikannya, dan dari sesama pekerja serta dari kemanusiaannya (Giddens & Held, 1987). Semakin banyak kekayaan diproduksi kaum pekerja untuk pemilik pabrik, semakin besar kekuatan dan keluasan produksinya, semakin miskinlah kaum pekerja tersebut. Semakin banyak komoditas yang mereka produksi, semakin murahlah kaum pekerja sebagai komoditas. Semua akibat ini merupakan implikasi dari pernyataan bahwa pekerja terhubung ke hasil kerjanya sebagai suatu objek yang asing. Melalui alasan itu, menjadi jelas bahwa semakin banyak pekerja mencerahkan dirinya dalam kerja, semakin perkasalah semesta objek-objek asing yang ia ciptakan di hadapannya, semakin miskinlah ia dari alam batinnya, dan semakin ia kehilangan dirinya (Suryajaya, 2016).

Keterasingan dalam pekerjaan adalah dasar segala keterasingan manusia. Menurut Marx, pekerjaan adalah tindakan manusia yang paling dasar: dalam pekerjaan, manusia membuat dirinya menjadi nyata (Suseno, 2000). Pada hakikatnya yang membuat manusia menjadi *homo humanus* adalah kerja. Bekerja menjadi sarana manusia untuk mencapai kenyataan sepenuh-penuhnya dan dalam aktivitas bekerja pula manusia menyatakan diri tidak seperti dalam keadaan kesadaran secara intelektual, melainkan secara berkarya, secara nyata sehingga ia memandang dirinya sendiri dalam dunia yang diciptakan sendiri (Ramly, 2013).

Manusia adalah makhluk ganda yang aneh. Satu pihak ia adalah makhluk alami seperti binatang yang membutuhkan alam untuk hidup. Namun, pada pihak

lain ia berhadapan dengan alam sebagai sesuatu yang asing dimana ia harus terlebih dahulu menyesuaikan alam dengan kebutuhan-kebutuhannya. Manusia berbeda dengan binatang. Manusia membuat kegiatan hidupnya menjadi objek kehendak kesadarannya, sementara binatang langsung menyatu dengan kegiatan hidupnya. Binatang hanya bekerja di bawah desakan naluri, persis sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi manusia bekerja secara bebas dan universal. Bebas karena dapat bekerja meskipun tidak merasakan kebutuhan langsung. Universal karena di satu pihak ia dapat memakai pelbagai cara untuk tujuan yang sama (Callinicos, 2000).

Bekerja juga berarti bahwa manusia mengambil bentuk alami dari objek alami dan memberikan bentuknya sendiri. Ia mengobjektivasikan diri ke dalam alam melalui pekerjaannya. Ia dapat melihat dirinya dalam hasil kerjanya, mendapat kepastian tentang bakat dan kemampuannya. Makna pekerjaan itu tercermin dalam perasaan bangga. Pekerjaan membuktikan kepada manusia bahwa ia tidak berkhayal, melainkan nyata (Ramly, 2013). Melalui pekerjaan, manusia membuktikan diri sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin setiap orang menghasilkan sendirian apa saja yang dibutuhkannya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia tergantung pada hasil pekerjaan manusia lainnya. Jadi, hasil pekerjaan manusia memenuhi kebutuhan manusia lain (Suseno, 2000).

Namun, fakta ekonomi dalam sistem kapitalis menunjukkan hal lain. Fakta ekonomi menunjukkan bahwa semakin banyak diproduksi kaum pekerja, semakin besar kekuatan dan keluasan produksinya, semakin miskinlah mereka. Semakin banyak komoditas yang mereka produksi, semakin murahlah kaum pekerja sebagai komoditas (Callinicos, 2000). Penurunan nilai dunia manusia berbanding lurus dalam proporsi dengan peningkatan nilai dunia benda-benda. Kerja tidak hanya memproduksi komoditas. Kerja juga memproduksi dirinya sendiri dan pekerja sebagai komoditas dan ia melakukannya dengan proporsi yang sama seperti halnya ia memproduksi komoditas secara umum (Suryajaya, 2016). Manusia menjadi terasing dari produknya sendiri. Hasil pekerjaan seharusnya menjadi sumber rasa bangga, seharusnya mencerminkan kecakapan pekerja. Tetapi sebagai buruh upahan ia tidak memiliki hasil pekerjaannya. Produknya adalah milik pemilik pabrik (Callinicos, 2000).

Akibat langsung keterasingan manusia dari produk kerjanya, dari aktivitas hidup dan watak spesiesnya adalah keterasingan manusia dengan manusia. Keterasingan dari hakikatnya berarti manusia terasing dari sesamanya karena

sifatnya yang sosial terasing juga daripadanya. Melalui kerja yang terasing dan tereksternalkan, sang pekerja menciptakan hubungan dengan kerja orang lain yang berada di luar dirinya. Hubungan pekerja dan kerja menciptakan hubungan antara kapitalis dan kerja tersebut (Callinicos, 2000). Keterasingan itu sendiri juga merusak hubungan masing-masing kelas. Buruh bersaing dengan sesama buruh dan pemilik modal dengan pemilik modal. Para buruh berebut tempat kerja, sedangkan para pemilik modal berebut pasar. Marx memperlihatkan bahwa dalam masyarakat yang berdasarkan hak milik pribadi, hubungan antara manusia terjadi dalam lingkup persaingan: keuntungan yang satu merupakan kerugian yang lain dan sebaliknya.

Dengan demikian, keterasingan dalam kerja yang telah dikonsepkan oleh Karl Marx diatas memiliki dua unsur, yaitu penindasan/pemerasan dan inversi (pembalikan). Penindasan terjadi karena hubungan tenaga kerja dengan pekerjaan yang dilakukan terasing oleh karena ia hanya bekerja untuk orang lain, yaitu pemilik modal. Sedangkan inversi terjadi dalam hubungan manusia dengan produk yang ia hasilkan. Dalam hubungan kerja, manusia seharusnya berkuasa atas produk yang ia hasilkan. Namun, dalam sistem kerja kapitalis, produk yang dihasilkan berkuasa atas tenaga kerja itu sendiri (Collier, 2004).

Keterasingan dari diri sendiri

Keterasingan dalam pekerjaan bukan saja membuat manusia terasing dari hasil kerjanya. Namun, manusia juga menjadi terasing dari dirinya sendiri. Karena hasil pekerjaan yang terasing darinya, tindakan bekerja itu sendiri pun kehilangan arti bagi si pekerja. Pekerjaan tidak lagi menjadi pelaksanaan hakikatnya yang bebas dan universal, pekerjaan malah menjadi pekerjaan paksaan (Suseno, 2000). Perwujudan kerja adalah objektivikasinya. Pada ranah ekonomi-politik, perwujudan kerja ini tampil sebagai lenyapnya kenyataan bagi pekerja, objektivikasi sebagai lenyapnya objek dan ikatan pada objek, dan perampasan sebagai keterasingan (Suryajaya, 2016). Jadi bukan pekerjaan itu kebutuhan si pekerja, melainkan ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pekerjaan, sebagai sarana untuk mempertahankan kehidupan fisik (Suseno, 2000).

Dalam sistem kapitalis hakikat yang mulia dari bekerja kehilangan makna. Manusia tidak lagi mengembangkan diri, melainkan memiskinkan diri, karena mereka bekerja bukan untuk membuat sebuah karya atas hasil karya mereka, tetapi hanya untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh pemilik modal (Collier, 2004). Seluruh perhatian terpusat pada satu-satunya saat di mana ia masih dapat padat

menjadi dirinya sendiri: waktu pekerjaan selesai dan ia dapat pulang dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya. Karena pekerjaan adalah tindakan hakiki manusia, maka dengan memperalat pekerjaannya semata-mata demi tujuan memperoleh nafkah, manusia memperalat dirinya sendiri (Suryajaya, 2016). Watak spesies manusia, baik dalam kodrat maupun daya-spesies intelektualnya, menjadi sebuah entitas yang asing darinya dan suatu sarana untuk keberadaan individualnya. Manusia telah terasing dari tubuhnya sendiri, dari alam yang ada di luar dirinya, dari hakikat spiritualnya (Suryajaya, 2016). Ironis, sang pekerja hanya mengalami dirinya tatkala ia tidak sedang bekerja, sementara ketika ia tengah bekerja pun ia tidak mengalami dirinya sendiri.

Kekuasaan Uang

Tanda keterasingan dalam pekerjaan itu adalah menjamurnya kekuasaan uang. Manusia tidak lagi bertindak demi sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri atau demi kebutuhan sesama, melainkan hanya sejauh tindakan menghasilkan uang. Semuanya dilihat dari segi harganya. Maka uang menandakan keterasingan manusia dari alam dan dari sesama manusia (Suseno, 2000). Berkat sifat uang yang dapat membeli dan merengkuh segala sesuatu, uang merupakan objek yang paling berharga untuk dimiliki. Keuniversalan sifat tersebut adalah landasan dari kekuasaan uang. Uang adalah *mucikari* antara kebutuhan dan objek, antara hidup dan sarana hidup (Suryajaya, 2016).

Apa yang ada bagiku melalui wahana uang, apa yang bisa kubayar, itulah aku. Semakin perkasa kekuatan uangku, semakin perkasalah aku. Sifat-sifat uang adalah sifat-sifatku dan daya-dayaku yang paling hakiki, sebagai pemiliknya, karena itu, siapakah aku dan apa yang bisa kulakukan sama sekali tidak ditentukan oleh individualitasku. Aku buruk rupa, tetapi aku bisa membeli perempuan yang paling cantik. Artinya, aku tidak buruk rupa, sebab efek keburuk-rupaan, daya yang membuatku dijauhi orang, sudah ditangkal uang (Suryajaya, 2016).

Demikianlah kutipan dari Goethe yang menjelaskan bagaimana kekuasaan uang. Selain itu, uang memiliki sifat keilahian yang bisa ditatap dengan mata telanjang, perubahan semua sifat manusia dan alam menjadi kebalikannya, kekacauan dan pembalikan universal atau hal ihwal – uang menghasilkan sesuatu yang dianggap manusia tidak mungkin. Kekuasaan uang menjadi landasan universal, untuk merendahkan martabat manusia. Kekuasaan uang dalam hakikatnya merupakan hasil keterasingan dan eksternalisasi hakikat spesies manusia yang terus bergerak memuaskan dirinya dengan jalan pahit yakni mengekternalisasi dirinya sendiri. Dengan kata lain, uang merupakan kapasitas

manusia yang tereksternalkan (Suryajaya, 2016).

Upaya Interpretatif terhadap Pandangan Karl Marx Terkait Masalah Korupsi

Sistem ekonomi kapitalis yang ingin direvolusi oleh Karl Marx merupakan sebuah gambaran yang memperlihatkan bahwa manusia harus hidup melalui sebuah persaingan. Manusia pada hakikatnya hidup secara harmonis dengan alam dan manusia-manusia lainnya. Namun, sistem kapitalis melalui konsep pemilikan pribadi, manusia menjadi berebut dan bersaing untuk memiliki alam atau materi. Proses ini menjadi semacam serigala terhadap manusia lainnya. Manusia menjadi semakin terasing dari sesamanya, semakin menyendiri dan semakin terputus hubungannya dari manusia lainnya. Hubungan yang lebih manusiawi berubah menjadi hubungan bisnis (Budiman, 1989). Pada saat inilah keserakahan itu tidak dapat dihindarkan lagi. Sistem kapitalis telah menempa manusia menjadi manusia serakah. Dengan kata lain, kapitalisme menyuburkan keserakahan manusia sehingga praktik korupsi menjadi tidak mengherankan terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis.

Kelas sosial yang terbentuk melalui sistem kapitalis menciptakan manusia yang terasing secara golongan. Kelas atas hanya akan berjuang bagi golongannya sendiri, demikian juga kelas bawah juga hanya akan berjuang bagi golongannya. Perjuangan kelas pun akan menimbulkan persaingan yang hanya berfokus pada cara mempertahankan diri dalam kelas-kelas tersebut. Perjuangan kelas menjadi sarana juga bagi setiap manusia dalam golongannya untuk menjadi serigala bagi manusia lainnya. Dengan kata lain, dalam kelas sosial, persaingan yang terjadi bukan hanya sebatas mementingkan kelas masing-masing. Namun, persaingan terjadi dalam hubungan ada yang menindas dan ada yang ditindas. Penindasan menjadi hal yang wajar sejauh untuk perjuangan kelas sosial, karena dengan jalan itulah kelas-kelas sosial mampu untuk bertahan. Apabila penindasan menjadi wajar, maka kesosialan manusia pun secara tidak langsung tergerus oleh perjuangan kelas yang terjadi. Artinya, manusia menjadi cenderung individualis dalam bertindak, terutama dalam hal mengumpulkan materi untuk kepentingan kelasnya. Perjuangan kelas tersebut terlihat melalui karakter pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan pencarian untung sebesar-besarnya.

Pencarian untung sebesar-besarnya menjadi tujuan utama para pelaku ekonomi. Produksi dilakukan bukan untuk nilai guna dari suatu barang namun untuk mencari untung sebesar-besarnya. Barang hanya digunakan sebagai sarana untuk

memperoleh laba. Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam sebuah sistem, tujuannya adalah mengumpulkan laba sebesar-besarnya. Bahkan, keuntungan tersebut berasal dari nilai lebih yang diperoleh dari kerja buruh. Artinya, keuntungan berasal dari hasil menindas kaum buruh melalui pengaturan lama kerja buruh dalam sehari. Semakin lama buruh bekerja maka semakin banyak produk yang dihasilkan, sehingga semakin besarlah untung yang diperoleh dari kerja kaum buruh. Dengan kata lain, kepentingan egoistik, yaitu kepentingan untuk memperoleh keuntungan sendiri adalah nilai tertinggi dalam sebuah sistem ekonomi. Hal ini yang mensistemasi keserakahan manusia yang kemudian melahirkan bibit-bibit tindakan korupsi.

Proses kerja kaum buruh pun terkena dampak dari sebuah sistem. Kerja adalah tindakan manusia yang paling dasar. Namun, hakikat kerja berubah menjadi suatu keterasingan bagi manusia dalam sistem kapitalis. Manusia tidak dapat menikmati kerja yang ada dalam sistem kapitalis. Selain itu, kerja bukan menjadi kebutuhan dasar manusia tetapi menjadi sarana untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, kerja menjadi suatu hal yang terpaksa. Manusia pun bertindak sejauh hanya untuk menghasilkan uang. Hal ini terlihat dari kekuasaan uang. Berkat sifat uang yang dapat membeli segala sesuatu, uang menjadi objek yang paling berharga untuk dimiliki. Kekuasaan uang menjadikan manusia bertindak serakah terhadap uang.

Jadi, menurut penulis berdasarkan analisis Karl Marx, sistem ekonomi kapitalis tersebut mengalienasikan manusia dari diri manusia itu sendiri. Sistem ekonomi kapitalis mendikte manusia untuk memperjuangkan kelas masing-masing dalam hubungan ada yang menindas dan ada yang ditindas. Persaingan antar kelas tersebut dilakukan dengan cara mencari untung sebesar-besarnya. Pencarian untung sebesar-besarnya tersebut diperoleh dari nilai lebih yang dihasilkan dari kerja kaum buruh. Kaum buruh sendiri bekerja dalam keadaan terpaksa karena dalam sistem ekonomi kapitalis kerja menjadi suatu kegiatan yang terasing dari diri manusia. Manusia teralienasi kemanusiaannya oleh karena pengejaran akan materi (untung). Keterasingan tersebut terlihat dalam bentuk kekuasaan uang. Kelas pemilik modal teralienasi karena berfokus untuk mempertahankan kelasnya dengan cara mencari untung sebesar-besarnya. Sementara, di pihak lain, kelas pekerja teralienasi karena kerja yang terpaksa. Kelas pekerja teralienasi dari dirinya sendiri karena ia bekerja bukan sebagai kebutuhan melainkan memenuhi kebutuhan hidup. Secara otomatis ia pun teralienasi dari orang lain di sekitarnya karena hanya

berfokus kepada cara memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup.

Dengan demikian, baik kelas pemilik modal maupun kelas pekerja menjadi terasing dan terkombinasi dengan sistem ekonomi yang berpusat pada pencarian untung atau materi semata. Hubungan manusia tidak lagi merupakan hubungan sosial melainkan lebih cenderung kepada hubungan bisnis. Manusia yang pada awalnya bersifat sosial berubah menjadi individualis. Keterasingan tersebut pada akhirnya menghasilkan manusia-manusia yang serakah. Uang menjadi fokus manusia, sehingga manusia cenderung diabaikan. Manusia serakah tersebut semakin menemukan jalan dalam sistem ekonomi yang demikian sehingga tindakan korupsi menjadi tidak begitu mengejutkan terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, korupsi dalam tinjauan berdasarkan analisis Karl Marx terjadi karena kerserakahannya akibat sistem kapitalis yang membuat manusia terasing dan hanya berfokus kepada uang.

Korupsi dan Alienasi dalam Agama

Realitas korupsi yang terjadi dalam lingkup agama menjadi sebuah pertanda bahwa agama sendiri belum sadar benar ketika diperhadapkan dengan masalah korupsi. Padahal seperti apa yang pernah digagas oleh Mohammad Hatta, agama merupakan sebuah kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk membentuk manusia-manusia sosialis. Alih-alih membangun manusia sosialis, lembaga yang mengurus agama pun justru terjerat korupsi. Gairah beragama yang tinggi di Indonesia hanya mengarahkan umatnya untuk membangun relasi dengan Tuhan. Agama pun diam di tempat ketika terjadi banyak sekali penindasan terhadap rakyat yang kurang mampu.

Tidak terlalu salah ketika Karl Marx menyatakan bahwa agama adalah sebuah bentuk keterasingan dalam masyarakat. Ketika terjadi penderitaan dan penindasan dalam sebuah sistem kapitalis, orang-orang datang ke dalam agama berharap dapat menyelesaikan masalahnya di dalam agama tersebut. Agama dalam bagian tertentu secara tidak langsung merupakan ungkapan kemiskinan sekaligus protes atas kemiskinan yang membuatnya tidak berkembang. Alih-alih memperbaiki keadaan miskin dan represif ini lewat praksis, agama malah meninabobokan orang lewat khayalan surgawi. Sama seperti candu membuat orang malas dan terlena dalam khayalannya, agama pun tidak bersifat emansipatoris, artinya tidak membebaskan manusia dari keadaan miskinnya (Tjahjadi, 2016). Artinya, agama menjadi sebuah keterasingan bagi manusia

(khususnya kelas pekerja) yang hidup dalam sebuah sistem kapitalis karena telah dininabobokan oleh sebuah khayalan surgawi dari penindasan yang terjadi di dunia. Dengan kata lain, manusia menjadi terasing dalam agama yang memberikannya penghiburan semu.

Agama juga menjadi sebuah keterasingan apabila dilihat dari sisi kelas pemilik modal. Karena agama dapat saja digunakan sebagai sarana untuk melegitimasi keadaan sosial yang sedang terjadi. Agama digunakan menjadi sarana agar orang-orang yang tertindas dalam sebuah sistem masyarakat menerima keadaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan penawaran sorga yang baka bagi orang- orang yang tertindas di dunia. Dengan kata lain, agama menjadi keterasingan karena digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan kelas pemilik modal dalam persaingan sistem ekonomi kapitalis. Apabila keterasingan yang dialami oleh kelas pekerja dan kelas pemilik modal di atas terjadi, maka menjadi hal yang wajar korupsi terjadi di dalam lingkungan agama. Artinya, orang-orang yang berada di dalam agama memiliki kemungkinan yang sama untuk melakukan korupsi karena dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis.

Menurut Karl Marx agama merupakan sebuah bentuk keterasingan. Dalam hal ini, dapat terlihat bahwa Karl Marx sama sekali tidak mengklarifikasi agama dari segi apa yang ia bahas. Apabila agama dipahami disini sebagai ajaran, dogma, ritus, rubrik dan organisasi, maka pandangan tersebut dalam arti tertentu bisa diterima. Tetapi, jika agama secara hakiki adalah kepercayaan kepada Tuhan maka hal ini sulit untuk diterima (Tjahjadi, 2016). Namun, apabila ditelisik lebih dalam, Karl Marx mengkritik agama dari segi fungsi agama tersebut. Hal ini tergambar dari karakter orang-orang yang datang kepada agama. Agama dijadikan sebagai tempat memperoleh penghiburan semu atas penindasan yang dialami. Agama juga dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi keadaan sosial yang sarat ketidakadilan. Padahal, apabila ditelisik lebih dalam, hakikat agama lebih dari sekadar tempat memperoleh penghiburan. Pada hakikatnya agama adalah tempat dimana terdapat penerimaan adanya Tuhan. Sehingga anggapan bahwa argumentasi sosial-politik yang membuat orang lari ke dunia gaib, tidak bicara apa pun mengenai kebenaran atau ketidakbenaran adanya Allah (Tjahjadi, 2016). Selain itu, agama juga memberikan penekanan kepada pemeluknya untuk menaati ajaran-ajaran di dalamnya, termasuk di dalamnya ajaran tentang kehidupan sosial. Jadi, pada bagian ini, Karl Marx cenderung hanya memperhatikan fenomena orang-orang yang masuk ke agama tanpa memperhatikan esensi apa yang terdapat dalam agama tersebut.

Dengan demikian, korupsi yang terjadi di dalam agama adalah akibat ketersinggan yang dialami oleh kelas pekerja dan kelas pemilik modal dalam sebuah sistem ekonomi kapitalis. Karl Marx menyatakan bahwa struktur masyarakat terbagi dalam dua tingkatan, yakni: pertama, bangunan atas, dimana agama, ideologi dan negara termasuk di dalamnya. Kedua, basis, yaitu struktur kekuasaan ekonomis, di mana terdapat hubungan-hubungan produksi-material dari kelas-kelas sosial yang bertentangan. Keadaan dan perubahan sosial ditentukan oleh “basis”. Konsekuensinya apabila “basis” berubah maka “bangunan atas” tempat agama berada pun akan berubah juga. Dengan kata lain, agama dalam keadaan tertentu sangat rentan dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan manusia terasing. Jadi, menjadi wajar ketika korupsi pun terjadi dalam lingkungan agama.

Agama Sebagai Komunitas Sosial dalam Upaya Mereduksi Korupsi

Korupsi dalam tinjauan berdasarkan analisis Karl Marx terjadi karena kerserakahan akibat sistem kapitalis yang membuat manusia terasing dan hanya berfokus kepada uang. Korupsi yang terjadi di dalam agama adalah akibat ketersinggan yang dialami oleh kelas pekerja dan kelas pemilik modal dalam sebuah sistem ekonomi kapitalis. Agama adalah sebuah bentuk ketersinggan dalam masyarakat. Ketika terjadi penderitaan dan penindasan dalam sebuah sistem kapitalis, orang-orang datang ke dalam agama berharap dapat menyelesaikan masalahnya di dalam agama tersebut. Agama sebenarnya memiliki dua aras yaitu vertikal dan horizontal. Keduanya merupakan hal yang sama-sama penting dan tidak saling bertentangan. Mohammad Hatta berpandangan bahwa agama, terkhusus agama Islam di Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk membentuk manusia menjadi manusia sosial. Menurut ajaran Islam, alam semesta adalah kepunyaan Allah. Allah menjadikan bumi ini semata-mata untuk kediaman manusia. Manusia lahir ke dunia dengan tidak punya apa-apa. Demikian juga ketika meninggalkan dunia juga tidak membawa apa-apa. Ini menunjukkan bahwa dunia ini merupakan kepunyaan Tuhan. Karena itu manusia mempunyai kewajiban memelihara bumi ini sebaik- baiknya. Dengan pengakuannya, bahwa Tuhan orang Islam adalah Tuhan Yang Pengasih dan Penyayang serta Maha adil, orang Islam mempunyai kewajiban untuk melaksanakan di atas dunia ini suatu masyarakat, yang berdasarkan kasih sayang, rasa persaudaraan, tolong menolong serta keadilan sosial. Dengan demikian, semua manusia akan merasakan hidup sejahtera dan bahagia (Hatta, 1985).

Agama Kristen pun memiliki aspek sosial dalam ajarannya. Ajaran tentang kasih yang terdapat dalam Matius 22:37-40 yang berisi demikian:

Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."

Injil di atas menunjukkan bahwa ajaran agama Kristen memiliki dimensi yang lain selain relasi dengan Tuhan, yaitu relasi dengan sesama manusia. Dimensi sosial tersebut terlihat dalam hubungan dengan sesama manusia yang harus didasarkan atas kasih (Samarennna, 2020). Artinya, kesosialan manusia itu dituntut juga dalam ajaran agama Kristen. Terlebih lagi, Injil juga mencatat pengajaran Yesus yang terdapat dalam Matius 25:35, 36 dan 40 yang berisi demikian:

Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku;... Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.

Artinya, relasi yang dibangun atas dasar kasih dengan sesama menunjukkan bahwa umat Kristen juga sedang membangun relasi atas dasar kasih dengan Tuhan. Penggambaran tentang melayani seorang raja yang lapar, haus, dan orang yang membutuhkan itu disejajarkan dengan melayani seorang yang paling hina. Dengan kata lain, umat kristiani memiliki tugas untuk mengasihi orang-orang yang membutuhkan sebagai tanggung jawab kepada Tuhan (Suyatin, 2020).

Kisah penciptaan diakhiri dengan penciptaan manusia, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26-27). Dalam bahasa Latin kata segambar dan serupa dengan Allah dipakai kata *Imago Dei*. Ini berarti menunjuk kepada keberadaan manusia yang berkepribadian dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Manusia pantas untuk mencerminkan sang Pencipta dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Manusia mampu mengasihi Dia dalam segala perbuatan mereka. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam kerangka sebagai penataan ciptaan Allah lainnya. *Imago Dei* mengungkapkan bahwa manusia diciptakan dengan tempat khusus, yaitu dalam relasi dengan Allah dan dengan sesama ciptaan (Saptanjo, 2001).

Sesungguhnya gambar Allah itu ditujukan pada totalitas manusia, termasuk

segi fisik dan segi rohaninya. Tetapi Alkitab Perjanjian Lama mengajarkan bahwa dalam tubuh manusia ada suatu keindahan dan kemuliaan yang tidak terdapat dalam makhluk lainnya. Rasul Paulus dalam Roma 12:1 menasehatkan supaya manusia mempersesembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. di samping itu Paulus mengingatkan bahwa tubuh manusia adalah bait Roh Kudus (I Kor 3:16). Itulah sebabnya manusia harus memuliakan Allah melalui tubuhnya dan bukan mencemarkannya. Mansia memiliki faktor dan sifat Ilahi (Maz 8:5). Manusia memiliki hukum moral dalam dirinya yang dipertanggung-jawabkan kepada Allah Sang Pencipta. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia secara pribadi dapat bersekutu dengan Allah (Sianturi et al., 2023).

Pemahaman tentang manusia sebagai gambar Allah seyogianya menjadikan umat Kristen melihat bahwa ia harus memuliakan manusia. Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sarat eksplorasi, penindasan dan pemerasan. Seyogianya pemahaman tentang manusia sebagai gambar Allah mampu menyadarkan manusia untuk tidak menindas satu dengan yang lain hanya untuk memperoleh uang. Pemahaman manusia sebagai gambar Allah menjadi sebuah tanggung jawab manusia kepada Allah dengan cara memuliakan sesama manusia.

Apabila dihubungkan antara agama dan korupsi, seharusnya keduanya tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurut Alatas, dari sekian banyak penyebab terjadinya korupsi, lemahnya pengajaran-pengajaran agama dan etika merupakan salah satu diantaranya (Alatas, 1981). Agama juga harus mengutuk korupsi seberat dosa seksual (Karman, 2014). Kekuatan agama di Indonesia bukan hanya sebatas membangun relasi kepada Tuhan, tetapi menjadi sebuah komunitas yang memiliki andil untuk mempersempit ruang keterasingan itu. Dengan demikian, penekanan ajaran agama pun tidak boleh melupakan dimensi sosial dari agama tersebut. Secara institusi, gereja merupakan bagian dari agama.

Apabila berbicara tentang korupsi, gereja sering kali merasa bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah. Gereja pun merasa cukup hanya berdoa bagi pejabat pemerintah (1 Timotius 2:1-2). Bukan berarti doa tidak penting, tetapi doa saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah korupsi di bangsa ini (Karman, 2016). Padahal, praktik yang berbau keserakahan itu juga telah terjadi di dalam gereja. Salah satu contohnya terjadi di Gereja City Harvest, Singapura. Pastor Kong Hee dinyatakan bersalah oleh pengadilan Singapura atas tuduhan penipuan/penggelapan uang Gereja sebesar S\$24-35 juta untuk mendukung karir

menyanyi istrinya (BBC News Indonesia, 2015). Dengan kata lain, institusi gereja, bahkan pemimpin gereja sekalipun tidak kebal atas praktik korupsi.

Gereja di Indonesia seharusnya tidak mengambil posisi sebagai penonton di Negara Indonesia yang korup ini. Konsekuensi moralnya, orang Kristen memiliki tanggung jawab kepada Tuhan sekaligus kepada negara. Dalam arti itulah seharusnya gereja memaknai perkataan Yesus: “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Matius 22:21). Memang contoh ini terkait membayar pajak. Namun, secara analogis, pemberlakuan dapat diperluas. Sebagai warga kerajaan dunia, orang Kristen memiliki tanggung jawab politik untuk tidak membiarkan pembusukan negara melalui praktik korupsi yang meluas, termasuk praktik penggelapan pajak (Karman, 2016).

Selain itu, gereja harus mengingat bahwa ia memiliki tanggung jawab politik terhadap negara. Yeremia 29:7 haruslah dipahami sebagai dorongan untuk bertanggung jawab atas bangsa di mana seseorang hidup. Walaupun konteks Yeremia tersebut adalah pada masa pembuangan, setidaknya gereja menginsafi bahwa kesejahteraan negara ini juga merupakan kesejahteraan gereja.

“Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu Kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.” (Yeremia 29:7).

Setidaknya dua landasan teologis di atas menunjukkan bahwa gereja sebenarnya memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Dengan kata lain, gereja memiliki dimensi sosial dalam menjalankan tugasnya dan tidak sibuk dalam urusan “rohani” saja. Hal ini sangat terlihat jelas dari keteladanan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus dalam Kitab Injil. Keteladanan Yesus Kristus seharusnya tidak dilihat sebagai perbuatan untuk melepaskan manusia dari jerat dosa saja. Tetapi, keteladanan Yesus Kristus harus dipahami dalam dimensi sosial, di mana Yesus Kristus tidak hanya melayani satu bangsa saja, tetapi ia melayani semua bangsa. Dengan kata lain, Gereja, melalui teladan Yesus Kristus, seharusnya menjadi sebuah komunitas sosial yang menjawab tantangan korupsi secara bersama-sama.

Secara umum, gereja-gereja di Indonesia sebagian besar adalah gereja-gereja hasil pekabaran Injil dari Eropa. Sedangkan sebagian kecilnya berasal dari pekabaran Injil Amerika Utara. Gereja-gereja di Indonesia patut bersyukur atas itu. Namun, bukan berarti teologi yang dibawa dari Barat itu kemudian diimplementasikan secara harafiah begitu saja oleh gereja-gereja di Indonesia.

Gereja-gereja di Indonesia selayaknya memahami apa tugas dan panggilan

gereja itu sendiri. Gereja diutus ke dalam dunia. Bagaimana gereja dapat diutus ke dalam dunia? Tentu saja harus ada kesesuaian antara teologi yang dibawa oleh gereja dengan konteks di mana gereja itu hidup. Eddy Kristiyanto menyatakan bahwa dalam teologi yang berasal dari Barat dan Amerika Utara, konteks hanya digunakan sebagai latar belakang dari apa yang telah dilakukan teologi. Tetapi lebih dari pada sekadar latar belakang, konteks itu dipahami sebagai situasi dinamis religious dan budaya di mana pesan Kristen disesuaikan dengan proses pengakomodasian. Dengan kata lain, realitas yang kon(multi)tekstual menjadi sumber-sumber teologi sejauh realitas itu memanifestasikan dan mewujudkan kehadiran dan tindakan Allah dan Roh Kudus (Kristiyanto, 2016).

Terkait dengan konteks permasalahan di Indonesia, korupsi merupakan salah satu permasalahan yang masih terus diusahakan pemberantasannya. Korupsi bukanlah sebatas mencuri, mengambil hak milik orang lain atau masalah keberdosaan manusia. Korupsi mengandung unsur-unsur keterasingan, penindasan dan ketidakadilan. Apabila berbicara tentang unsur-unsur tersebut tentu saja hal tersebut tidak dapat lepas dari cara manusia beragama atau bergereja. Lama dalam sejarah teologi ditekankan pendekatan intelektual terhadap iman; ditekankan pula nada iman yang penuh kepasrahan, hidup rohani dan jalan yang menuju kesucian. Namun, saat ini gereja berada dalam periode sejarah di mana perlu ditekankan karya Allah di dunia dan sejarahnya, yang memotivasi dan mengarahkan kegiatan hidup kristiani dalam sejarah dunia. Iman kristiani berkaitan erat dengan tindakan. Dengan kata lain, keprihatinan gereja sekarang adalah bagaimana Injil sungguh merupakan kabar gembira yang membebaskan bagi gereja dan bagi masyarakat yang konkret sekarang (Banawiratma, 1987).

Teologi pembebasan terlihat sangat jelas ketika Yesus Kristus mewartakan Kerajaan Allah untuk orang miskin (Lukas 4:18-19). Pemberitaan kabar baik dalam bagian ini bukan hanya sebatas menerima Injil sebagai suatu kitab yang patut dipercaya. Pemberitaan kabar baik juga bukan berarti pemberitaan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Namun, pemberitaan bahwa Yesus adalah pembebas kaum miskin. Ia berjuang di pihak kaum papa dan menderita melawan kelompok penindas dan penghisap. Dengan demikian perjuangan bersama kaum miskin juga adalah perjuangan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam Lukas 4:18-19 (Chen, 2002).

Hal ini tentu tidak berbeda jauh dengan keadaan Indonesia. Negara Indonesia sering disebut sebagai negara berkembang. Tanpa memungkiri segala

perkembangan yang ada di Indonesia, sebenarnya melalui korupsi Negara Indonesia masih dibelenggu oleh penindasan dan ketidakadilan tersebut. Apabila gereja-gereja Indonesia diam atas permasalahan tersebut, tentu secara tidak langsung gereja di Indonesia cenderung kurang berteologi seturut konteks di mana gereja itu berada. Hal ini tentu akan semakin berbahaya karena berpotensi untuk melegitimasi penindasan yang terjadi di Indonesia.

Gereja melalui mimbar pemberitaan sabda Allah seharusnya tidak hanya memberitakan tentang “upahmu besar di sorga”. Gereja juga patut berbicara tentang kesejahteraan di dunia. Khotbah-khotbah yang selalu bernuansa “upahmu besar di sorga” perlu berhati-hati agar tidak sarat dengan penindasan. Khotbah semacam itu seakan melanggengkan penderitaan yang dialami oleh orang-orang miskin. Gereja tidak pantas menghibur manusia dari penderitaannya dengan mengalihkannya kepada sorga yang kekal. Gereja bukanlah alat untuk melegitimasi kekacauan sosial saat ini. Gereja seyogianya juga berbicara tentang keadilan yang harus diusahakan di dunia. Gereja harus melaksanakan visi misinya, yakni dipanggil dan diutus ke dalam dunia. Implementasi konkretnya dapat dijabarkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di dalam gereja. Gereja dapat melakukan pendidikan antikorupsi sejak dini kepada seluruh jemaat. Hal ini untuk memupuk paradigma positif dalam pikiran jemaat untuk bersama-sama memberantas masalah korupsi di Indonesia (Pasaribu & Boiliu, 2021). Selain itu, perlu dilaksanakan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan gereja untuk menegah terjadinya penyimpangan keuangan di dalam gereja (Adhi et al., 2017). Hal ini akan menjadi kontribusi positif gereja terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Korupsi berdasarkan pemikiran Karl Marx terjadi akibat sistem ekonomi kapitalis yang membuat manusia terasing. Keterasingan tersebut menghasilkan manusia-manusia yang serakah. Sistem ekonomi kapitalis tersebut mengalienasikan manusia dari dirinya sendiri. Sistem ekonomi kapitalis mendikte manusia untuk memperjuangkan kelas masing-masing dalam hubungan ada yang menindas dan ada yang ditindas. Persaingan antar kelas tersebut dilakukan dengan cara mencari untung sebesar-besarnya. Pencarian untung sebesar-besarnya tersebut diperoleh dari nilai lebih yang dihasilkan dari kerja kaum buruh. Kaum buruh sendiri bekerja dalam keadaan terpaksa karena dalam sistem ekonomi kapitalis kerja menjadi suatu

kegiatan yang terasing dari diri manusia. Dengan demikian, manusia teralienasi kemanusiaannya oleh karena pengejaran akan materi (untung). Keterasingan tersebut terlihat dalam bentuk kekuasaan uang.

Agama seyogianya menjadi suatu kekuatan yang berkepentingan untuk menciptakan manusia sosial untuk mereduksi keterasingan yang terjadi dalam sistem kapitalis. Pemberantasan korupsi bukan saja menjadi tugas negara, tetapi menjadi tugas agama, khususnya gereja. Hal ini sesuai dengan keteladanan dan keberpihakan yang ditunjukkan Yesus kepada orang miskin di dalam Matius 25:35. Oleh sebab itu, perlu sekali bagi gereja untuk menciptakan pemeluk agama yang memiliki karakter sosial yang tinggi. Bergereja tidak hanya tentang hubungan dengan Tuhan, tetapi bergereja juga menunjukkan perhatian serius kepada ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh korupsi. Melalui teladan Yesus Kristus, umat kristiani belajar banyak hal tentang bagaimana menjadi manusia yang berkarakter sosial. Yesus Kristus tidak hanya dipahami sebagai Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi teladan Yesus Kristus harus dipahami dan dihidupi sebagai Tuhan pembebas manusia dari segala bentuk penindasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, E., Dan, W., & Kristanto, H. (2017). Korupsi dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal. *INTEGRITAS*, 3.
- Agustina, D. (2022). AGAMA DAN EKONOMI: KEMISKINAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KARL MARX TENTANG AGAMA SEBAGAI ALIENASI. *Jurnal Moderasi: The Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies*, 2, 43–53. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/index>
- Alatas, S. H. (1981). *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. LP3ES.
- Ayu Maharani, R., Bima Klaten Widodo, A., & Tahara Siahaan, D. (2024). Korupsi sebagai Respon terhadap Krisis Ekonomi pada Lapisan Masyarakat Menengah ke Bawah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 546–551. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14380137>
- Banawiratma, J. B. (1987). Analisis Sosial dan Pembebasan: Refleksi Teologis. In J. B. Banawiratma (Ed.), *Kemiskinan dan Pembebasan*. Kanisius.

- BBC News. (2025). *Kronologi dua pejabat Pertamina jadi tersangka baru korupsi minyak mentah, diduga memerintahkan “oplos” atau blending RON 90 jadi Pertamax.*
- BBC News Indonesia. (2015, November 21). *Vonis penjara untuk enam tokoh gereja Singapura.* BBC News Indonesia.
- Bernard Raho. (2013). *Agama dalam Perspektif Sosiologi.* Obor.
- Budiman, A. (1989). *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia.* Gramedia.
- Callinicos, A. (2000). *The Revolutionary Ideas of Karl Marx.* Bookmarks Publications.
- Chen, M. (2002). *Teologi Gustavo Gutierrez: Refleksi dari Praksis Kaum Miskin.* Kanisius.
- Collier, A. (2004). *Marx: A Beginner's Guide.* Oneworld Publications.
- de Haan, A. E. M., & Takene, A. C. (2021). MEMAHAMI KONSEP KARL MARX “AGAMA ADALAH CANDU MASYARAKAT” DALAM PERILAKU BERIBADAH JEMAAT SEMAU UTARA, KLASIS SEMAU 1. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.*
<https://doi.org/10.31604/jips.v8i6.2021.1596-1609>
- Farihah, I. (2015). FILSAFAT MATERIALISME KARL MARX (Epistemologi Dialectical and Historical Materialism). *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 3(2).
- Giddens, A., & Held, D. (1987). *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik.* Rajawali.
- Hadiwijono, H. (1980). *Sari Sejarah Filsafat Barat.* . Kanisius.
- Hatta, M. (1985). *Membangun Ekonomi Indonesia.* Inti Idayu Press.
- Karman, Y. (2014). *Republik Galau Merajut Asa.* . Libri.
- Karman, Y. (2016). *Memahami Korupsi, Moralitas dan Karakter Beragama di Indonesia.* Persetia.
- Kristiyanto, A. E. (2016). Meretas Teologi Kon(Multi)Tekstual-Liberatif dalam Perguruan Tinggi Kita. In W. S. Wibowo & R. Setio (Eds.), *Teologi yang Membebaskan dan Membebaskan Teologi.* Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia .
- Medellu, S. S. B. (2021). SELAYANG PANDANG UNDANG-UNDANG ANTIMONOPOLI DI INDONESIA. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora.*

- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Pasaribu, M. M., & Boiliu, M. (2021). EDUKASI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN ANTIKORUPSI PADA ANAK SEJAK DINI. *Jurnal Education and Development*, 9 (3). [https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i3](https://doi.org/10.37081/ed.v9i3)
- Raharusun, J. H. (2021). Makna Kerja Menurut Karl Marx (Sebuah Kajian dari Perspektif Filsafat Manusia). *MEDIA: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 2.
- Ramly, A. M. (2013). *Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis*. LKiS.
- Rois, A. A. (2019). Karl Marx: Dari Kritik Agama ke Kritik Masyarakat. *PARADIGMA: JURNAL KALAM DAN FILSAFAT*, 1(1), 56–74. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/paradigma>
- Samarennna, D. (2020). Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Refleksi Matius 22:39-40. *Jurnal Teruna Bhakti*. <http://stakterunabhakti.ac.id/e-journal/index.php/teruna>
- Saptanjo, P. (2001). Manusia Gambar Allah dan Alam. In *Rancangan Kotbah: Jalan Salib Jangan takut!* . Badan Pembinaan GMI Wilayah II.
- Sianturi, A. H., Sianturi, Z., & Saragih, J. (2023). Manusia Sebagai Gambar Dan Rupa Allah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.
- Sofyanoor, A., Achmad, U., & Banjarmasin, Y. (2022). PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. *SIBATIK JURNAL | VOLUME*, 1(2). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.29>
- Suryajaya, M. (2016). *Teks-teks Kunci Filsafat Marx* . Resist Book.
- Suseno, F. M. (2000). *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyatin. (2020). Implementasi Pelayanan Holistik Berdasarkan Matius 25:35-36 pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura, Jayapua. *Epigraphe: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 4 (1). <http://www.sttorsina.ac.id/jurnal/index.php/epigraphe>
- Tjahjadi, S. P. L. (2016). Filsafat Marx, Agama dan Teologi. In W. S. Wibowo & R. Setio (Eds.), *Teologi yang Membebaskan dan Membebaskan Teologi* . Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia.
- Transparency International Indonesia. (2025). *INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2024: “KORUPSI, DEMOKRASI, DAN KRISIS LINGKUNGAN.”*

- Transparency International. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan-krisis-lingkungan/>
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner*, 6(1).
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>